

Bias Gender dalam Surat Kabar (Analisis Isi Pemberitaan Harian Umum Nasional Waspada Sumatera Utara Edisi 01 Agustus-31 Agustus 2018)

Fitri Rahmadani Angkat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This article discusses gender bias in the North Sumatra Waspada National Daily Newspaper, Edition 01 August-31 August 2018. The Waspada General Daily is one of the national newspapers in North Sumatra which still exists and is still active as a news channel. general daily. This newspaper has a vision and mission to deliver true news and does not favor one particular group. This article is a qualitative research with a descriptive approach. The results of the study indicate that the forms of gender bias that are displayed in the news by the General Waspada Daily are stereotypes, subordination, discrimination, and marginalization of women.

ARTICLE HISTORY

Submitted 13 May 2021
Revised 20 May 2021
Accepted 27 May 2021

KEYWORDS

Newspapers; Public Daily Waspada; Gender Bias

CITATION (APA 6th Edition)

Angkat, F. Rahmadani. (2021). Bias Gender dalam Surat Kabar (Analisis Isi Pemberitaan Harian Umum Nasional Waspada Sumatera Utara Edisi 01 Agustus-31 Agustus 2018). *Communication & Social Media*. 1(1), 31-40.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

fitri.angkat97@gmail.com

PENDAHULUAN

Media massa adalah sarana komunikasi yang cukup efektif dalam mensosialisasikan berbagai informasi serta mampu membentuk opini umum terhadap masyarakat luas (Cangara, 2010). Saat ini Media massa sudah menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Media massa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan pola pikir masyarakat. Apapun yang dihembuskan oleh media massa sering kali ditelan mentah-mentah oleh sebagian masyarakat. Sehingga tak heran jika surat kabar hingga saat ini masih memiliki pengaruh besar terhadap khalayak dengan sajian informasi yang ditampilkan di dalamnya, jangkauannya yang luas, bisa menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Namun, sampai sejauh ini media massa masih kerap tidak berlaku adil dalam memberitakan perihal gender. Dalam hal ini perempuanlah yang paling sering dirugikan.

Media massa yang digunakan masyarakat sangat beragam. Mulai dari radio, televisi, dan media cetak hingga media online yang berbasis internet (Mondry, 2008). Salah satu media cetak yang cukup populer dan efektif dalam menyampaikan informasi ialah surat kabar. Surat kabar lebih menitikberatkan pada penyebaran informasi agar diketahui oleh publik (Amri, 2019). Pada umumnya surat kabar diterbitkan harian, meskipun ada juga surat kabar mingguan. Dari segi ruang lingkungannya, ada surat kabar lokal atau surat kabar nasional (Yunus, 2010).

Surat Harian Umum Waspada adalah salah satu Surat kabar Nasional di Sumatera Utara yang hingga kini masih tetap eksis, serta masih aktif menjadi saluran pemberitaan. Penulis tertarik ketika pertama kali melihat Harian Umum Waspada edisi Minggu 26 Agustus 2018 dalam Rubrik Keluarga dengan judul " Tiga Hal Sering Dilupakan Muslimah Sudah Menikah ", dalam konteks ini tersirat bahwa media ingin membentuk opini bahwa perempuan sering abai mengenai kewajibannya setelah menikah. Hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji sebab ada momentum penting di bulan Agustus yakni 'Penganugerahan Saparinah Sadli', di mana Saparinah Sadli adalah salah satu tokoh penggerak perempuan yang berkomitmen kuat untuk memperjuangkan perempuan dalam segala bentuk kekerasan dan diskriminasi baik di lingkungan sosial maupun dalam pemberitaan. Penghargaan yang digagas oleh Saparinah Sadli berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi perempuan yang termarginalkan di Indonesia, terlebih lagi kurangnya apresiasi dan dokumentasi atas karya karya perempuan di berbagai bidang seperti akademik, teknologi, seni budaya, olahraga hingga aktivisme gerakan keadilan (Jurnal Perempuan, 25 Juli, 2019). Acara ini sudah digagas sejak 2002 dan 2004 bahkan berlanjut hingga bulan Agustus 2018 kemarin. Acara ini digagas untuk menemukan dan

memberi penghargaan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang luar biasa serta bertujuan untuk memberi inspirasi kepada masyarakat dan generasi penerus untuk terus bekerja demi terciptanya keadilan gender (Rita, dalam Jurnal Perempuan, 25 Juli, 2019). Hal lain yang tentunya tak kalah penting dalam acara 'Penghargaan Saparinah Sardj' adalah adanya penekanan bahwa sudah seharusnya perempuan diperlakukan dan ditempatkan secara adil, termasuk dalam pemberitaan.

Gender sering kali diartikan sebagai perbedaan peran sosial yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Perihal gender dan jenis kelamin sering kali dianggap sama. Padahal antara keduanya, baik makna maupun pengertian, istilah tersebut harus betul-betul dibedakan. Jenis kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin manusia, yang mengacu pada ciri-ciri biologis. Alat-alat tersebut secara biologis melekat dalam tubuh laki-laki maupun perempuan, serta posisinya tidak dapat dipertukarkan. Hal tersebut juga tidak melekat secara permanen dalam tubuh manusia sebab sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT. Sedangkan gender adalah peran sosial yang melekat dalam diri laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, bukan sebuah kodrat (ketentuan), melainkan diciptakan oleh manusia dari proses kultural yang panjang sehingga bisa berbeda-beda di setiap kondisi dan lingkungan.

Secara umum, diskursus gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat manusia beraktivitas. Sedemikian rupa perbedaan gender ini melekat pada cara pandang masyarakat ini, sehingga sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen layaknya ciri biologis yang dimiliki masing-masing manusia. Namun perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan bias gender yang termanifestasi dalam bentuk ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hal tersebut dapat kita lihat dari sejumlah pemberitaan yang kadang cenderung merugikan salah satu pihak, jika ditinjau dari isi beritanya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis isi pemberitaan dalam Harian Umum Waspada Edisi 01 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2018. Bagaimanakah media tersebut mengemas pemberitaan terkait gender, apakah terdapat ketimpangan atau tidak.

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian merupakan teknik-teknik spesifik dalam sebuah penelitian (Mulyana, 2002, p. 145). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis isi, karena metode ini dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik berupa buku, film, surat kabar, dan lainnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Sumber data dalam penelitian kualitatif menggunakan sumber data primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data diperoleh langsung dari sumber data penelitian (Informan), Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau dokumen terkait (Sugiono, 2017). Dalam penelitian ini sumber data primer berupa pemberitaan dalam Harian Umum Waspada Sumatera Utara Edisi 01 Agustus-30 Agustus 2018. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan seperti Pimpinan Redaksi Harian Umum Nasional Waspada Sumatera Utara Edisi 01 Agustus-30 Agustus 2018, dan beberapa sumber data pendukung lainnya seperti dokumen.

PEMBAHASAN

Bentuk Bias Gender pada Judul Berita Harian Umum Nasional Waspada

1. Stereotype (Stereotip)

Label terhadap suatu kelompok, berangkat dari persepsi sebagian masyarakat akan pembedaan peran maupun karakter antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya, ada asumsi bahwa perempuan adalah sosok makhluk yang lemah, cengeng, tidak berani, serta tidak lebih pintar dari laki-laki sehingga dianggap lebih pantas berada peran domestik yang dianggap aman, jauh dari kekerasan. Anggapan tersebut diungkapkan pada pemilihan judul dalam Harian Umum Waspada berikut:

“Perempuan Harus Terus Dicerdaskan dalam Berpolitik.”

Berpolitik merupakan ranah publik yang sering disandingkan dengan laki-laki. Kebanyakan orang meyakini bahwa bekerja dalam ranah politik adalah bagian ruang kerja laki-laki. Karena biasanya, bicara politik berarti berbicara kepemimpinan, kekuatan dan ketahanan, serta harus pintar dalam strategi. Berangkat dari salah satu aliran feminisme, yakni feminisme liberal yang berpadangan bahwa penyebab perempuan terbelakang adalah salah perempuan sendiri yang tidak rasional, dan bodoh, serta terlalu berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional (agama, tradisi, dan budaya yang statis tidak produktif). Oleh sebab itu tidak heran jika perempuan khawatir ketika bekecimpung dalam dunia politik. Pemilihan judul menggambarkan bahwa perempuan memang golongan jenis kelamin yang terbelakang dalam hal politik, dan harus disetarakan dengan upaya pencerdasan politik. Sterotipe lemah terhadap perempuan juga terdapat pada judul “Nenek Vokalis Band Metal.” Band metal adalah sebuah grup aliran musik berat, yang biasa didominasi oleh kaum laki-laki. Ciri khas paling melekat pada band metal adalah suara berat khasnya kaum adam. Sedangkan jika dilihat dari segi pakaian, band metal seringkali memakai pakaian yang nyentrik, serta dandanan yang serba hitam.

Judul berita “Nenek Vokalis Band Metal”, menunjukkan ada potensi kemampuan yang sama dengan laki-laki, dimiliki oleh perempuan bahkan seorang nenek sekalipun. Menjadi bagian band metal apalagi menjadi vokalis dalam hal ini adalah sebuah keadaan di luar kebiasaan seorang perempuan yang dalam penentuan perannya di masyarakat lebih cenderung dengan aliran musik pop, ataupun menyanyi dengan pembawaan yang slow dan lembut mendayu. Hanya saja judul tersebut di tempatkan pada bagian kolom ‘Ada-ada Saja’, yang menunjukkan bahwa perempuan, apalagi dengan umur yang terbilang tua (lanjut) merupakan sesuatu yang tidak lumrah untuk menyanyikan lagu dengan aliran musik yang sering diidentikkan dengan laki-laki. Hal tersebut tentu akan menunjukkan bahwa Harian Umum Waspada, seolah berusaha melanggengkan stereotipe bahwa perempuan adalah sosok lemah lembut. Selain itu laki-laki dalam masyarakat selalu dilabeli sebagai pencari nafkah keluarga, sedangkan perempuan meskipun ikut mencari nafkah, tetapi selalu ditempatkan pada posisi sebagai penopang perekonomian keluarga, atau masyarakat. Hal tersebut bisa kita lihat pada judul “Bangkitkan Ekonomi Umat, Ibu perwiran datangkan Enterpreneur Muda,”. Di sisi lain, ada pula stereotipe yang menyatakan bahwa perempuan memang punya ranah kerja domestik “Dapur, Kasur, sumur’ yang digambarkan pada judul “ Ratusan IRT Demo PDAM Tirtanadi.”

Demo adalah upaya pernyataan protes atau ketidaksetujuan atas sebuah kebijakan, atau sering juga disebut sebagai ‘unjuk rasa’. Sekilas memang tidak ada yang salah, hanya saja jika dikaitkan dengan gender akan menjadi sesuatu yang tidak biasa jika ada ratusan IRT (Ibu Rumah Tangga) yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut PDAM Tirtanadi. PDAM adalah singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum. Seperti kita ketahui, air adalah salah satu kebutuhan pokok rumah tangga yang bisa digunakan untuk memasak, mencuci, dan kegiatan bersih-bersih lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa air sangat erat dengan kegiatan sektor domestik yang biasa dilakukan oleh perempuan. Demo yang dilakukan oleh IRT, menggambarkan bahwa adanya kekhawatiran para IRT akan ketersediaan air yang akan menghambat berjalannya aktivitas sektor domestik. Dalam hal ini Waspada memandang bahwa mengangkatnya dalam berita dengan stereotipe yang dimiliki wanita, adalah nilai jual yang baik untuk disampaikan kepada penguasa, dengan harapan tidak terulang kejadian yang sama. “Dari sisi jurnalistik, itu diangkat bukan untuk menghina, dengan harapan kalau bisa jangan seperti itu lagi, harapannya Waspada menjualnya ke penguasa untuk memberi pesan “supaya penguasa mau memperhatikan kesulitan rakyat”, (Jelas humas Waspada Bapak Erwan Efendy). Kondisi saat demo didominasi IRT memperjuangkan hak-hak pendukung berjalannya aktivitas, memperkuat stereotype bahwa perempuan memang bertugas di dapur. Padahal jika merujuk pada firman Allah QS. An-Nisa ayat (4): 34

تَخَافُونَ وَاللَّيْلِ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظْتُ قَبِيَّتِي لِحْتِ الْقَالِصِ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَيَمَا بَعْضِ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَصَلَّ بِمَا النَّسَاءِ عَلَى قَوَامُونَ الرِّجَالِ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنْ لَأَسِي عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعَنَكُمْ فَإِنْ وَاضِرِيُوهُنَّ الْمَصَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فِعْظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ

“Kaum laki-laki (suami) itu adalah penanggungjawab bagi kaum perempuan (isteri) oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak bersamanya, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. Menurut literatur tafsir modern seperti al-Manar (karangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla) menyatakan bahwa kepemimpinan suami (laki-laki) bagi isterinya itu memiliki fungsi himayah (membela), ri’ayah (melindungi), wilayah (mengampu) dan kifayah (mencukupi). Al-qiwamah bukan berarti dominasi dan kekuasaan dari penanggungjawab, tetapi merupakan beban dan tanggungjawab yang

harus dipenuhi (Azisah and Kara, 2016, p. 60). Jadi apabila laki-laki (suami), menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam arti membela, melindungi, mencukupi, dan mengampu perempuan (istri), demo oleh IRT tak perlu terjadi. Hanya saja disini perempuan diberi beban kerja untuk memperjuangkan kebutuhan sektor domestik sendirian. Sementara dari segi kepemimpinan, seorang perempuan dengan label cengeng, selalu mengedepankan perasaan. Sering kali diragukan kepemimpinannya. Seperti pada judul berita “Jaga Kepercayaan Masyarakat, AKBP Juliani Prihartini Kasat Lantas Yang Baru,”.

Dalam sebuah konstruksi sosial bekerja menjadi polisi merupakan ranah kerja laki-laki. Image berani, tegas, disiplin, dan kuat yang di bangun oleh masyarakat menciptakan pandangan yang umum bahwa menjadi polisi identik dengan laki-laki karena sifat maskulinnya. “Jaga kepercayaan masyarakat” adalah sebuah keyakinan bahwa menjadi seorang pimpinan adalah sesuatu hal yang tidak mudah apalagi jika dilakukan oleh perempuan, mengingat labeling cengeng, dan mengedepankan perasaan, dikawatirkan akan merusak kinerjanya, serta merusak image polisi sebagai pengayom masyarakat.

2. Subordinasi

Subordinasi adalah sebuah anggapan bahwa posisi maupun tugas suatu kelompok berada lebih rendah dibandingkan kelompok lain. Dalam sebuah media adanya indikasi subordinasi, tidak begitu terlihat, adakalanya bentuk subordinasi diperlihatkan dengan pemilihan kata. Seperti pada judul “Harapan Wapres Terhadap Pertamina Dibawah Nicke”. Dalam judul tersebut, Harian Umum Waspada menggambarkan adanya peluang yang sama terhadap perempuan untuk menjadi pimpinan. Judul berita tersebut adalah gambaran prestasi oleh perempuan dalam ranah publik yakni dalam bidang pertambangan yang identik dengan ranah kerja laki-laki. Hanya saja meskipun berada pada posisi pimpinan, kehadiran laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi entah sebagai pengawas atau sebagai pemegang kendali masih tampak pada ‘Harapan Wapres Terhadap Pertamina Di bawah Nicke’. Di mana pada masa itu posisi Wakil Presiden di pegang oleh Jusuf Kalla. Harapan Wapres (Jusuf Kalla) terhadap Nicke, menunjukkan meskipun kapasitas Nicke sebagai pimpinan, Harian Umum Waspada tetap ingin menekankan bahwa di atas kepemimpinannya sebagai perempuan masih ada laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Perempuan diposisikan sebagai orang yang lemah dan tidak mandiri, sehingga butuh pengawasan lewat bayang-bayang harapan.

3. Marginalisasi

Marginalisasi adalah wujud dari adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Politik merupakan salah satu ranah publik yang sering dianggap oleh masyarakat sebagai ranah laki-laki. Sehingga sangat jarang ada perempuan yang mampu berdiri dalam kancah perpolitikan, baik di Indonesia bahkan Internasional. Padahal jika dilihat dari rasio antara laki dan perempuan, maka perempuan menempati posisi terbanyak dibanding laki-laki. Akhir-akhir ini banyak perempuan dari kalangan artis yang mencoba peruntungan lewat dunia politik, disatu sisi hal tersebut menunjukkan bahwa ruang publik semakin terbuka luas bagi perempuan. Akan tetapi disisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa mencuatnya perempuan ke ruang publik, akibat kecemasan para perempuan akan aspirasi serta cita-cita perempuan itu sendiri, yang sampai saat ini tidak terpenuhi. Apalagi kuota untuk perempuan dari dulu hingga sekarang masih jauh di bawah laki-laki. Kehadiran perempuan semata-mata ingin meyarakan hak perempuan, yang tidak dipahami oleh kaum laki-laki yang duduk di legislatif. Misalnya seperti kutipan judul berita berikut:

“Ingin Wujudkan Kebudayaan, Krisdayanti Pilih Jadi Caleg,”

Kutipan judul tersebut menunjukkan bahwa, Krisdayanti yang notabenenya adalah artis perempuan yang berkecimpung dalam dunia tarik suara memilih menjadi caleg, untuk memenuhi cita-citanya dalam mewujudkan kebudayaan, yang dirasa tak pernah tersuarakan oleh laki-laki yang ada di legislatif. Beranjak ke dunia internasional, kalau di Indonesia ada Krisdayanti dan sejumlah artis perempuan lainnya, maka dari negara lain juga masih banyak perempuan yang tak terwakili aspirasinya dalam menyuarkan aspirasi seperti judul berita “Rashida Tlaib, Wanita Muslim Pertama di Kongres AS” dan “Muslimah Somalia Menuju Kongres AS”. Berangkat dari pandangan feminisme liberal tentang kesetaraan gender, bahwa Feminisme liberal memandang salah satu penyebab ketertinggalan perempuan adalah, karena terlalu memegang teguh ajaran agama dan tradisi. Ajaran agama dianggap cenderung patriarki, sehingga acapkali menyebabkan perempuan diposisikan pada kelas kedua, akibatnya potensi perempuan di dunia publik yang senantiasa produktif dan dinamis seringkali dibatasi. Dua Judul diatas memeperlihatkan dua

perempuan muslim di AS mampu menembus kongres AS. Hal ini memperlihatkan masih minimnya peran perempuan dalam Kongres terutama perempuan muslim.

Bentuk Bias Gender pada bagian Isi Berita Surat Kabar Harian Waspada

1. Stereotype (Stereotip)

Ada banyak stereotip yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan perempuan. Misalnya, sifat feminim yang dilekatkan padaperempuan seperti, lemah, lebih banyak menerima sesuatu dengan pasrah, ulet, telaten, dan lain sebagainya. Dengan kecendrungan sifat feminim tersebut perempuan dianggap lebih cocok bekerja pada sektor domestik yang tak memerlukan banyak tenaga, seperti digambarkan pada kutipan isi berita dalam Harian Umum Waspada berikut: "Meskipun mulai langka, namun melihat kaum wanita paruh baya menganyam tikar di Aceh, tergolong hal biasa. Tapi sesuatu yang luar biasa ketika melihat gadis-gadis Aceh ikut menganyam tikar pandan dalam berbagai model. Bahkan mereka juga ikut mengajari pengunjung dari berbagai kabupaten atau kota di Aceh."

"Kerajinan songket Batubara merupakan usaha turun temurun dilakukan masyarakat khususnya bagi kaum hawa sejak dulu sampai sekarang sebagai sumber pendapatan keluarga". Budaya menganyam dan menenun adalah dua jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan yang memang lazim dilakukan oleh perempuan. Jika dilihat dari tingkat kesulitannya juga, sebenarnya menganyam dan menenun bukanlah pekerjaan yang cukup menguras tenaga, hanya saja menganyam adalah pekerjaan yang memerlukan ketelitian, keuletan, serta kesabaran dalam setiap pembuatannya. Sehingga pekerjaan menganyam dan menenun seringkali dianggap sebagai ranahnya perempuan, apalagi jika dilekatkan stereotip bahwa perempuan lemah dan lebih cocok melakukan pekerjaan yang ringan-ringan saja.

Sifat feminim pada perempuan, juga ternyata tak hanya mewariskan posisi kerja yang cenderung pada ranah domestik, akan tetapi juga dianggap menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Misalnya ketika perempuan memilih bekerja di luar wilayah domestik, dianggap tidak layak. Dalam pandangan masyarakat secara umum, perempuan dianggap tidak berkewajiban mencari nafkah, karena tanggung jawab tersebut sudah dipegang oleh laki-laki. Perempuan diposisikan sebagai yang dinafkahi, bukan menafkahi. Kalaupun ada perempuan yang bekerja disamping menjadi ibu rumah tangga, hal tersebut dianggap sebagai pengisi waktu luang, atau sekedar membantu perekonomian keluarga. Seperti pada kutipan isi berita berikut: "Program Studi (Prodi) Peternakan Universitas Graha Nusantara (UGN) P. Sidempuan bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Sipirok memberikan penyuluhan kepada kalangan ibu rumah tangga di kecamatan Arse. Kab. Tapsel agar kreatif bekerja dalam menopang ekonomi keluarga."

"Camat Arse, Sahrudin perwira S.Sos mengatakan, penyuluhan yang diberikan Prodi peternakan UGN P. Sidempuan sejalan dengan program kecamatan Arse untuk menjadikan kalangan ibu rumah tangga di daerah itu sebagai role model bagi daerah lainnya dalam mendorong perekonomian masyarakat lewat home industri. Ketua Kelompok Pembina Wanita Tani Kecamatan Arse, Mediawati Siregar, SST, M.Kes mengapresiasi UGN yang telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat". "Alhamdulillah songket Batubara sudah menembus pasar dunia dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Guna membangkitkan ekonomi keumatan, ratusan ibu-ibu perwiran se- Desa Pematang Johar mendatangkan enterpreneur muda ekspor dan impor Indonesia untuk melakukan pembekalan dan belajar bisnis rumahan. Adapun bisnis usaha yang ditawarkan oleh enterpreneur muda ekspor dan impor Indonesia Ikrama Anwar dengan mengajak kaum ibu membuat apa saja kerajinan tangan maupun olahan makanan dengan minimal produk tersebut harus diproduksi satu kontainer.

Seiring berjalannya waktu, di era kapitalis seperti sekarang ini, tuntutan hidup mulai bertambah membuat perempuan akhirnya mencoba ikut mengambil andil dalam perekonomian. Beberapa kutipan isi berita di atas juga menjelaskan, meskipun digambarkan bahwa perempuan juga mampu melakukan pekerjaan mencari nafkah sama seperti laki-laki, tapi tetap saja jenis pekerjaannya disesuaikan dengan ciri khusus seorang perempuan dilihat dari jenis pekerjaannya seperti, membuat kerajinan tangan maupun olahan makanan, seperti biasanya dilakukan kebanyakan

ibu-ibu, sehingga dinilai tak membutuhkan keahlian khusus karena perempuan dianggap sudah terbiasa dengan hal tersebut. Tak cukup sampai disitu, stereotip yang melekat pada perempuan juga tampaknya menghasilkan kesenjangan yang cukup memprihatinkan dan terpelihara hingga kini, terutama dalam kebudayaan primitif yang menganggap bahwa ranah peran perempuan adalah 'kasur, dapur, sumur.' Cuplikan isi berita yang menerangkan hal tersebut bisa kita lihat pada kutipan berikut. "Ratusan warga yang didominasi kaum ibu ini menuntut pihak Tirtanadi Cabang Delitua segera mendistribusikan air ke daerah pemukiman mereka. Para pengunjung rasa merupakan pelanggan PDAM yang selama ini menggantungkan kebutuhan air bersih dari perusahaan daerah itu."

"Salah seorang ibu rumah tangga, sedang membawa air dalam jerigen"

Posisi perempuan digambarkan sebagai kelompok yang cukup berani mengambil sikap, serta paling merasa menderitaketika air yang dianggap sebagai suatu komponen yang cukup dekat dengan kehidupan perempuan dalam menjalankan peran domestiknya (seperti mencuci, memasak, mandi, dan kegiatan bersih-bersih) sulit didapatkan. Stereotip lemah juga bisa kita lihat pada kutipan, "Danis, menjelaskan dari penelitian yang mereka lakukan terdapat beberapa faktor yang membuat ketertarikan perempuan masih minim dalam dunia politik. Salah satunya yakni adanya persepsi bahwa dunia politik adalah dunia yang keras, sehingga mereka menjadi tidak berani bertarung." Politik merupakan sebuah ranah publik yang dekat dengan sifat maskulin seperti keras, bertarung, sehingga dianggap kurang cocok dengan perempuan. Kutipan di atas menunjukkan bahwa perempuan merupakan sosok yang tidak berani bertarung atau lemah. Stereotip lemah yang dilekatkan kepada perempuan akhirnya membatasinya dalam keikutsertaan dalam ranah publik.

Dalam sebuah pemberitaan media, perempuan sering kali dimunculkan dalam ruang pemberitaan yang justru semakin menunjukkan, bahkan memperkuat sisi kelemahan perempuan itu sendiri, sehingga ketidakberdayaan perempuan seolah menjadi nilai jual yang cukup menguntungkan. Tidak jauh berbeda dengan pandangan Harian Umum Waspada terkait perempuan bahwa memang perempuan dianggap memiliki nilai jual dan mewakili sebuah kesedihan. "Pemberitaan itu ada dari yang banyak ke yang kecil, ada yang dari yang kecil ke banyak. Jadi untuk berita tersebut (berita yang menampilkan sosok perempuan), itu kan berita orang banyak, masih banyak di negara ini yang susah air, kita angkat kepada pengusaha, jadi kita perlu ada contoh seperti perempuan menjunjung air dari tempat jauh dengan hasil air yang tak seberapa. Perempuan mewakili kesedihan, dan mendekati orang pada perhatian yang sungguh. Nah ketika kita menampilkan perempuan dalam keadaan susah, maka orang akan mudah simpati. Sehingga ada harapan agar pemerintah mau tergerak membantu kesusahan rakyat"

2. Subordinasi

Adapun bias gender dalam bentuk subordinasi dalam isi pemberitaan Harian Umum Nasional Waspada dapat kita lihat pada kutipan berikut: "Kapolrestabes juga mengingatkan Kasat Lantas dan Kabag Sumda agar dapat melaksanakan tugas selalu berhati-hati dan menjaga kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat". Terkait stereotip pelindung, pengayom, dan pelayan yang seringkali dikaitkan kepada laki-laki dengan segala sifat maskulinnya. Sebenarnya sifat maskulin tersebut bukanlah satu-satunya yang paling dituntut dari seorang polisi maupun perwira. Apalagi kehidupan sosial membentuk stereotip tersebut hanya dilihat dari satu sisi saja. Gambaran peran polisi yang identik dengan peperangan, senjata, mampu membela diri dari serangan musuh inilah yang membuat banyak dari kalangan perempuan memilih untuk mengambil peran yang jauh lebih aman dan terbawa oleh stereotip lemah yang terbentuk oleh masyarakat.

Perempuan juga memiliki hak yang sama karena karakter polisi bukan hanya bicara soal maskulinitasnya saja, tapi juga peran dan tanggung jawab sebagai manusia. Dalam hal ini penempatan perempuan dengan karakternya yang humanis dan ramah mungkin jadi salah satu pertimbangan, mengingat tugas polisi juga akan banyak berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai jenis latar belakang. "Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto mengingatkan para pejabat di lingkungan Polrestabes Medan harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat untuk menyikapi berbagai tantangan, tuntutan dan harapan masyarakat, bersikap humanis, serta melayani dengan hati sesuai dengan tugas pokoknya". Akan tetapi jika diperhatikan dengan teliti pemilihan posisi perempuan dalam kepemimpinan juga tak lepas dari alasan stereotip yang dimiliki oleh perempuan yakni karakter humanis yang lembut sehingga lebih cocok

pada posisi pelayanan masyarakat lalu lintas, sangat jarang perempuan di tempatkan pada posisi yang cukup riskan. Hal ini menunjukkan penempatan perempuan pada posisi pemimpin, tidak semata-merta karena prestasi yang dicapai akan tetapi karena adanya karakter humanis, serta statusnya sebagai perempuan, yang sewaktu-waktu akan dibutuhkan, mengingat ada beberapa peran polisi yang mungkin kurang tepat bila ditangani oleh laki-laki, seperti penggeledahan wanita, atau pemeriksaan saksi korban kejahatan dalam rumah tangga, kasus trafficking in person dan lainnya.

3. Marginalisasi

Bias gender dalam bentuk marginalisasi dalam isi pemberitaan Harian Umum Waspada adalah:

“ Kalau nantinya terpilih menjadi anggota DPR RI, Yanti ingin duduk di Komisi X yang mebidangi kebudayaan atau di Komisi VIII mebidangi perempuan dan perlindungan anak”.“ Ketika ditanya, jika nantinya terpilih sebagai anggota DPR RI akan memilih komisi yang mebidangi apa? Kirana menjelaskan akan memilih komisi VIII mebidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pilihan lainnya adalah di komisi I mebidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika, Intelijen”.

Dua kutipan isi berita di atas menjelaskan tentang 2 artis perempuan yang memutar haluan menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Dilihat dari tujuan pencalonan kedua artis perempuan tersebut ada indikasi bermuatan gender. Dimana mereka lebih memilih mebidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang notabene sering dianggap sebagai kaum lemah, perlu perlindungan, dan diberdayakan. Tidak halnya dengan laki-laki. Bahkan stereotip tersebut seolah dipertahankan dengan adanya bidang tersebut. Pencalonan kedua artis tersebut sepertinya tidaklah luput dari anggapan bahwa kondisi perempuan di Indonesia sangatlah tidak seimbang dalam hal pemenuhan aspirasi dalam hal memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Apalagi kita ketahui jumlah laki-laki yang duduk di parlemen berbanding terbalik dengan jumlah perempuan. Dimana dalam diskusi membahas permasalahan publik yang mana di dominasi oleh laki-laki tentunya mereka kurang peka terhadap kondisi perempuan Indonesia yang sebenarnya amat penting.

Tak jauh berbeda dengandua kutipan di atas , dalam cuplikan kutipan berikut :

“Tlaib menyatakan pencalonannya menjadi Anggota Kongres AS dilandasi alasan personal dan didorong oleh kecemasan putranya menjadi Muslim di tengah meluasnya Islamofobia di AS. Selama ini Tlaib mendukung upah setara untuk kaum perempuan, biaya kuliah gratis, layanan kesehatan publik, hak-hak LGBTQ, Pencabutan larangan perjalanan Trump, perlindunganlingkungan dan reformasi imigrasi AS”

Hal tersebut menjelaskan adanya alasan personal seorang Rashida Tlaib memilih menjadi anggota kongres didasari pada keprihatinan akan perbedaan upah terhadap perempuan. Disini Tlaib berusaha memperjuangkan nasib perempuan dengan upah yang setara dengan laki-laki lewat kedudukannya di Kongres AS. Semakin banyak perempuan yang memilih jalur parlemen untuk berjuang, mengindikasikan bahwa semakin kompleksnya permasalahan perempuan itu sendiri. Sehingga ketika yang membahasnya perempuan maka akan lebih mudah menemukan solusi. Bangkitnya peran perempuan dalam politik sebagai upaya penyampaian hak-hak perempuan yang tidak tersuarakan oleh laki-laki sebagai pendominasi posisi di legislatif. Dominasi laki-laki di legislatif, serta minimnya peran perempuan dalam mengambil keputusan menyebabkan terpinggirkannya hak-hak perempuan dalam masyarakat.

4. Diskriminasi

Bias gender berupa marginalisasi pada isi pemberitaan dalam Harian Umum Waspada, adalah sebagai berikut :

“Sementara itu pemerhati Politik dari lembaga survey Akselerasi Group Danis Tri Saputra, mengatakan saat ini dinamika politik terus berkembang seputar keterlibatan kaum perempuan. Yang terbaru yakni mengenai aturan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pendaftaran calon legislatif”.Salah satu perjuangan kaum feminis liberal adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individual termasuk perempuan atas dasar kesamaan

keberadaannya sebagai makhluk rasional, tak terkecuali dalam kehidupan politik di Indonesia yang cenderung diskriminatif. Terbukti pada penempatan kuota perempuan yang kurang seimbang dengan sejumlah aspirasi perempuan yang ada dimasyarakat. Terkait pengangkatan berita perempuan mengenai politik, Harian Umum Waspada melalui Humas Harian Umum Waspada, bapak Erwan Efendy memandang, hal tersebut sebagai upaya dukungan agar perempuan memenuhi posisi tiga puluh persen di legislatif.

“Setelah masa orde baru dan masa reformasi perempuan tidak pernah dikaitkan dengan ranah politik di legislatif, maka muncul kebijakan bahwa perempuan harus ada di legislatif sekitar 30 persen, dan waspada mendukung itu, peraturan pemerintah tentang keterlibatan gender dalam ranah politik, waspada ingin bahwa gender itu benar-benar diprofesionalkan di 30 persen tadi, dan bahkan sekarang pun itu belum tercapai, oleh karena itu waspada terus menguatkan hal tersebut (politik) dalam pemberitaannya supaya para pemegang hak di parpol memperhatikan betul keterlibatan perempuan dalam memenuhi kuota 30 persen. Harus betul-betul dilaksanakan, Waspada ingin itu, banyak mengangkat gender terkait politik. karena banyak kan perempuan yang berkualitas ,membangun negeri seperti Cut Nyak Din, Kartini, lalu knapa sekarang kok dkecilkan?. Waspada menganggap wanita juga mampu di situ (politik). “Selain dalam hal politik, salah satu permasalahan kesetaraan terhadap hak-hak perempuan yang cukup sulit dan berat hingga saat ini adalah, pendidikan. Realitas umum yang kita jumpai perempuan sering dianggap sebelah mata. Kesulitan tersebut juga tergambar pada cuplikan isi berita berikut:

“Menurut Sabrina, Syaibah tidak perlu khawatir tentang pendidikan maupun pekerjaan. Karena saat ini banyak yang menghargai orang-orang yang berprestasi, baik itu di pekerjaan ataupun saat akan mendaftar di universitas. Semua prestasi dihargai di mana saja.”

Gambaran sulitnya akses pendidikan juga tak terlepas dari adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, karena nantinya akan bekerja di dapur juga. Anggapan tersebut menjadi alasan Sabrina sebagai (SekdaprovSU) memberi dorongan bagi pebulutangkis perempuan Syaibah untuk tetap memperhatikan pendidikan, sebagai indikasi masih berlakunya anggapan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Padahal bagi sejumlah orang pendidikan sering dianggap sebagai salah satu pembuka jalan kesuksesan, dan jalan memperbaiki perekonomian, serta mampu menaikkan derajat hidup.

“Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (SekdaprovSU) Hj. Sabrina, meminta Syaibah Hani Chandra, tetap memperhatikan pendidikannya. Karena pendidikan merupakan hal penting untuk menunjang masa depan yang lebih baik”. Menurut Suleman dalam Rahmi dan Habibullah (menyebutkan ada beberapa faktor terjadinya ketidaksetaraan gender, diantaranya:

- 1) Semakin tinggi pendidikan formal semakin terbatas jumlah yang tersedia.
- 2) Semakin tinggi pendidikan semakin mahal biaya sekolah
- 3) Investasi dalam pendidikan juga seringkali tidak dapat mereka rasakan karena anak perempuan menjadi anggota keluarga suami setelah mereka menikah.

Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat ditengah masyarakat menjadi salah satu hal yang membuat kesempatan bagi perempuan kian sempit mengenyam pendidikan, sehingga terbentuk keraguan bagi perempuan, serta angan-angan yang cukup rendah untuk mengenyam pendidikan. Penentuan peran, posisi, serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dengan kehidupan sosial serta pandangan kebudayaan yang berbeda-beda tak pernah memberikan ketentuan yang pasti. Buktinya, pada sebagian daerah, Gender secara umum dimaknai sebagai konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Sehingga dalam masyarakat akan kita jumpai pembagian peran laki-laki dan perempuan. Di mana laki-laki selayaknya mengurus urusan luar rumah (publik), sedangkan perempuan mengurus urusan dalam rumah (domestik). Bahkan di dalam masyarakat sangat tabu jika kedua hal tersebut dipertukarkan. Sebagai salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar, dalam menyikapi permasalahan ketimpangan gender, sudah sepatutnya menjadikan Islam dengan aturannya yang kompleks termasuk

tentang gender sebagai patokan dalam berbuat, sehingga kita tidak perlu mempermasalahkan segala hal terkait perbedaan gender.

Terkait perempuan bekerja pada sektor publik, Islam tak pernah melarangnya, karena hukumnya mubah. Hanya saja kebolehan perempuan bekerja dalam sektor publik mengharuskan perempuan untuk tidak meninggalkan yang utama bagi mereka yakni sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Perempuan dalam Islam memiliki tugas utama yakni sebagai *al-Umm wa rabbah al-bayt* (ibu sekaligus pengurus rumah tangga), di mana perempuan harus melaksanakan tugas utamanya yakni mendidik dan mengurus kebutuhan putra-putrinya, serta menjadi istri yang taat selama tidak dalam kemaksiatan. Sehingga peran ibu cerdas sangat diperlukan dalam Islam.

Dalam Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja, termasuk dalam mencari nafkah bagi keluarga. Perempuan mencari nafkah bukanlah sebuah kewajiban adapun bila perempuan ikut andil memenuhi nafkah, maka itu termasuk sedekah. Meskipun diperbolehkan bekerja, namun Islam juga tidak mendorong untuk melakukan hal tersebut. Kesempatan untuk bekerja bagi perempuan diberikan ketika ia dalam keadaan menanggung biaya hidupnya dan anak-anaknya, ada yang bertanggung jawab atas nafkahnya namun tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok yang menjadi tanggungannya, apalagi jika desandikan dengan realita sekarang. Sejarah Islam juga menerangkan di zaman Rasulullah juga pernah berlaku hal demikian yaitu ketika Zainab meminta Bilal untuk menanyakan apakah sah jika ia menafkahi suami dan anak-anak yatim yang menjadi tanggungannya, kemudian Rasulullah menjawab “Ya, sah. Dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala kerabat dan pahala sedekah”. Dalam H.R Muslim disebutkan “Suamimu dan anak-anakmu adalah orang yang paling berhak untuk kamu beri sedekah.” Mujtaba’ (Dewi, 2017, p. 15). Sedangkan dalam kehidupan politik, Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam secara detail membahas permasalahan hidup termasuk politik untuk mempermudah pemeluknya, maupun diluar pemeluknya untuk berpartisipasi dalam politik tanpa melanggar syariat-Nya.

Istilah Kata yang Sering Dipakai untuk Menggambarkan Bias Gender dalam Pemberitaan Surat Kabar Harian Waspada.

Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan menggunakan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Dalam dunia jurnalistik bahasa merupakan senjata dan kata-kata merupakan pelurunya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat mempresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan penekanan seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. UNESCO Guideline on Gender-Neutral Language 1999, menyatakan, “Bahasa tidak hanya mencerminkan cara kita berpikir itu juga membentuk pemikiran kita. Jika kata-kata dan ungkapan yang menyiratkan bahwa perempuan lebih rendah dari pria terus-menerus digunakan, bahwa asumsi inferioritas cenderung menjadi bagian dari pola pikir kita. Oleh karena itu perlu untuk menyesuaikan bahasa ketika ide-ide kita berkembang”.

Ada banyak faktor yang akhirnya membuat bahasa maupun pemilihan kata dalam isi berita cenderung bias. Diantaranya karena banyaknya pengelola ruang redaksi diisi jurnalis yang belum mempunyai pemahaman gender, sehingga perspektif yang muncul masih sangat maskulin atau bahkan karena adanya kepentingan tertentu, baik kepentingan politis maupun ekonomis. Perihal gender, Harian Umum Waspada dalam pemberitaannya selalu berusaha agar tidak ada kata-kata yang berbau bias. Melalui sebuah wawancara dengan pihak Harian Umum Waspada melalui Bapak Erwan Efendy menyatakan Harian Umum Waspada tidak bisa lepas dari gender, apalagi jika dilihat dari sejarah berdirinya.

“Terkait gender, jika diperhatikan dari segi historisnya, Waspada dilahirkan oleh gender, yakni oleh Pak H. Muhammad Said dan Ibu Hj. Ani Idrus. Ibu Hj. Ani Idrus cukup luar biasa konsen terkait perempuan, makanya Waspada pernah punya majalah wanita yang diberi nama ‘dunia wanita’ di tahun 70-80-an. Hal tersebut sebagai bukti bahwa Ibu Hj. Ani Idrus cukup memperhatikan perihal gender. Selain itu, bentuk perhatian Beliau terhadap gender adalah dengan memberi nama pasukan penyapu jalan dengan nama ‘pasukan melati’ sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan”. Harian Umum Waspada juga mengakui bahwa hal yang sangat tidak mungkin jika Waspada akan menyudutkan perempuan apalagi dari dulu hingga sekarang Harian Umum Waspada juga dipimpin oleh perempuan. Harian Umum Waspada juga sangat respon dan respek terhadap perempuan.

“Beliau (Ibu Hj. Ani Idrus), pernah jadi ketua PWI dan satu-satunya ketua berjenis kelamin perempuan. Bekal itulah yang Waspada ingat sampai sekarang, bahwa gender adalah bagian yang harus di ungkap dalam pemberitaan. Waspada cukup memberi perhatian tentang gender, karena berdirinya Waspada juga tidak terlepas dari gender. Bahkan mulai dari pendiri hingga pimpinan Waspada yang sekarang itu adalah perempuan, sehingga tidak mungkin menyudutkan kelompoknya sendiri. Waspada juga selalu respon dan respek terhadap berita terkait perempuan apalagi berita pemerkosaan, dizolimi, wapada mengangkat itu”.

Berita-berita terkait gender yang diangkat oleh Harian Umum Waspada secara spesifik mungkin tidak menunjukkan adanya pemilihan judul maupun kata dalam isi yang serupa dalam setiap edisinya, Harian Umum Waspada tiap edisinya tetap memuat judul dengan pemilihan kata yang cukup bervariasi, sehingga tidak begitu mudah melihat adanya kecenderungan Harian Umum Waspada terhadap salah satu kelompok gender tertentu. Hanya saja setelah melakukan penelitian terhadap dokumen berupa koran Harian Umum Waspada, peneliti menemukan ada istilah kata yang cukup sering ditampilkan dalam pemberitaan Harian Umum Waspada. Istilah tersebut adalah ‘penopang ekonomi’. Pemberian istilah tersebut secara konsisten disematkan kepada perempuan yang turut andil dalam mencari nafkah. Hal tersebut bisa kita lihat dari kutipan isi berita berikut:

“Program Studi (Prodi) Peternakan Universitas Graha Nusantara (UGN) P. Sidempuan bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Sipirok memberikan penyuluhan kepada kalangan ibu rumah tangga di kecamatan Arse. Kab. Tapsel agar kreatif bekerja dalam menopang ekonomi keluarga guna membangkitkan ekonomi keumatan , ratusan ibu-ibu perwiraan se- Desa Pematang Johar mendatangkan enterpreneur muda ekspor dan impor Indonesia untuk melakukan pembekalan dan belajar bisnis rumahan. Alhamdulillah songket Batubara sudah menembus pasar dunia dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat”.

Peneliti menemukan penyebutan istilah ‘penopang ekonomi’ tersebut memang tidak digambarkan secara gamblang dalam pemberitaannya. Akan tetapi dibuat bervariasi seperti ‘pembangkit ekonomi’ dan ‘membantu ekonomi’ namun sejatinya tetap memiliki makna yang sama. Di Indonesia, salah satu bidang kehidupan yang cukup terjal dijalani kaum perempuan adalah bidang ekonomi. Masyarakat terlanjur memahami bahwa dunia ekonomi adalah dunia laki-laki. Tidak heran jika sejumlah regulasi dan kebijakan publik hanya menempatkan perempuan sebagai pekerja tambahan, bukan sebagai pekerja utama. Meski perempuan merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga, tetap saja dianggap sebagai pencari nafkah tambahan.

Secara tradisional, pola keluarga patriarki menempatkan istri sebagai pihak yang mengurus pekerjaan domestik. Sistem patriarki dalam sejarah gender, merupakan sistem yang menempatkan kekuasaan laki-laki (suami) atas perempuan (istri) dalam segala aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi laki-laki ditempatkan pada posisi pengusaha kelangsungan hidup keluarga, sedangkan perempuan berada pada posisi penerimaan, serta pembelanjaan keluarga. Perempuan (istri) dianggap sebagai bagian penting peran domestik, sedangkan laki-laki (suami) ditempatkan pada posisi publik. Pada umumnya peran domestik lebih banyak dipahami dan diposisikan sebagai milik perempuan yang melekat dan memiliki stereotipe berbeda dengan laki-laki yang dianggap peran rendah dan tidak punya nilai. Oleh karena itu baik laki-laki maupun perempuan kurang atau bahkan tidak menghargai pekerjaan domestik ini.

Stereotip perempuan dengan pekerjaan domestik masih menjadi cara yang paling ampuh untuk melanggengkan ideologi patriarki. Dikutip dari blog Ronny Agustinus dalam ulasannya pada tiga buku Folbre (Dhani, 2017), ia menulis bahwa kerja mengasuh dan merawat orang lansia/sakit, yang biasanya dilakukan oleh perempuan dalam keluarga, selama ini tidak dipandang sebagai kerja produktif. Ia tak dianggap punya nilai dalam perekonomian, tak masuk dalam hitungan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi suatu negara. Senada dengan hal tersebut Manneke Budiman menyebutkan bahwa pekerjaan domestik bukanlah suatu pekerjaan, karena dianggap tidak menghasilkan uang dalam dimensi ekonomi, sehingga pekerjaan domestik tidak termasuk bagian kerja yang produktif. Karena itu perempuan akan terus dibebani dengan pekerjaan domestik yang cukup berat tersebut (Budiman, 2013).

SIMPULAN

Bentuk bias gender yang terdapat pada judul pemberitaan Harian Umum Nasional Waspada berupa, stereotip, subordinasi, marginalisasi. Dalam stereotipe, anggapan bahwa perempuan adalah lemah, terbelakang digambarkan dengan merekatkan setiap aktivitas perempuan dengan aktivitas domestik, serta penekanan judul yang menjelaskan

bahwa perempuan memang terbelakang dalam hal-hal berbau politik. Dalam subordinasi, perempuan masih diposisikan di bawah laki-laki. Sedangkan dalam marginalisasi, kehidupan publik seperti politik masih didominasi, terlihat pada sejumlah judul berita yang menampilkan upaya keterlibatan perempuan perempuan dalam politik.

REFERENSI

- Amri, A. R. (2019). Strategi Harian Waspada dalam Meningkatkan Mutu Media cetak di Era Digitaslisasi. Medan.
- Azisah, S., and Kara, S. A. (2016). Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya. Makassar: Alauddin University Press.
- Budiman, M. (2013). Bapak Rumah Tangga: Menciptakan Kesetaraan atau Membangun Mitos atau Membangun Mitos Baru?. Yayasan Jurnal Perempuan Perempuan, 18(1).
- Cangara, H. (2010). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, N. N. (2017). Peran Gender dalam film Religi Islam Indonesia (Studi Analisis Isi Peran Gender dalam film Religi Islam Indonesia). Surakarta.
- Mondry. (2008). Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyana, D. (2002). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Yunus, S. (2010). Jurnalistik Terapan. Bogor: Ghalia Indonesia.